RENCANA REVIEW KAWASAN HUTAN MELALUI REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

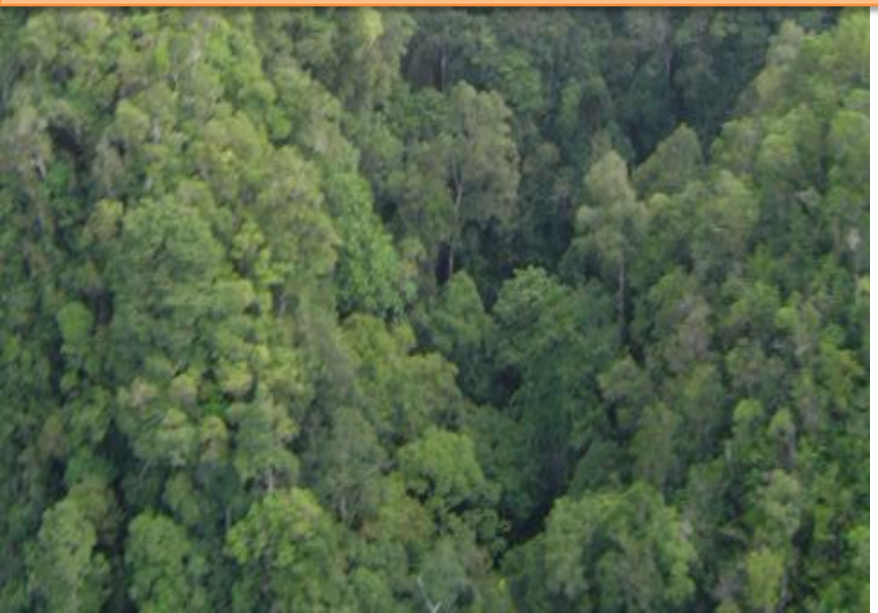

DISAMPAIKAN OLEH

Ir. BEN POLO MAING

(Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT)

Pada Seminar Regional "Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan Dalam Perspektif Tata Ruang "

DINAS KEHUTANAN PROVINSI NTT

PETA WILAYAH PROVINSI NTT

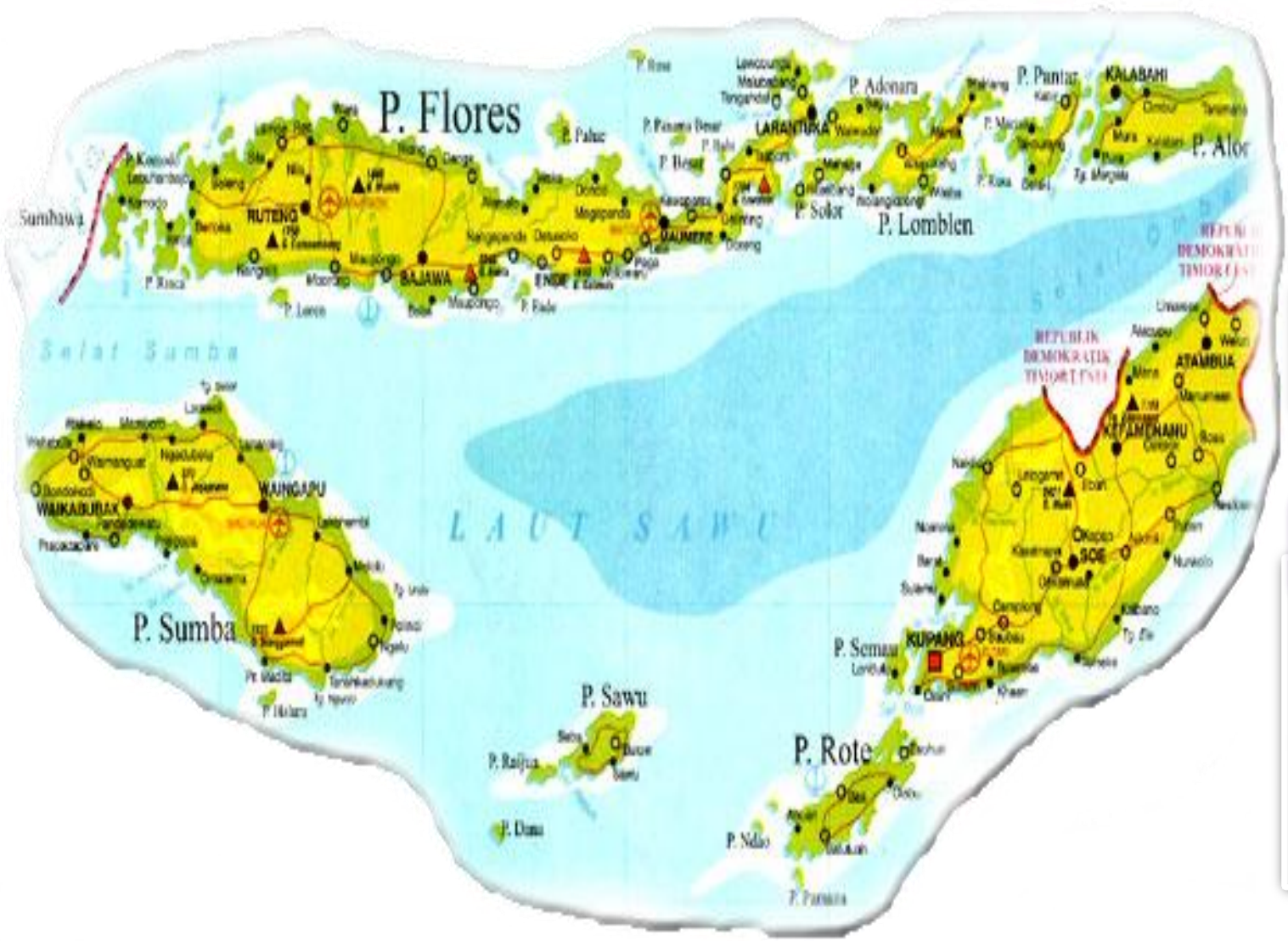

Wilayah

4.734.990 Ha

Penduduk

4.776.485 jiwa

Administrasi

21 kabupaten
1 kota
298 kecamatan
316 kelurahan
2.801 desa

PERDA PROV. NTT TENTANG RTRWP

Ditetapkan dengan Perda No. 1 Tahun 2011, tanggal 15 April 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2010 - 2030

Substansi Kehutanan : **"tidak terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam review RTRW Provinsi NTT"** (sesuai surat Gubernur NTT kepada Menteri Kehutanan Nomor : BU.522/03/Bappeda/2010 tanggal 1 Desember 2010, perihal persetujuan substansi kehutanan, serta Surat Menteri Kehutanan kepada Gubernur NTT Nomor : S.5/Menhut-VII/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal Persetujuan Substansi Kehutanan

Substansi Penataan Ruang dalam Perda NTT No.1/2011

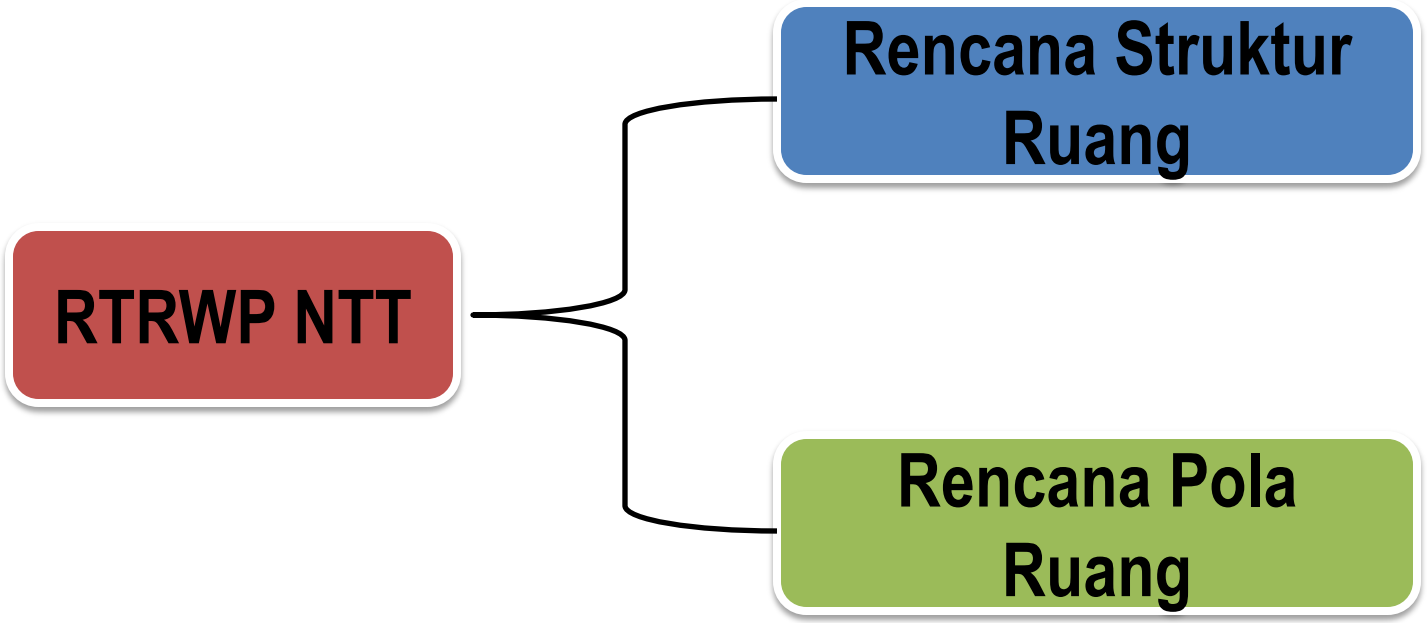

Substansi Penataan Ruang dalam Perda NTT No.1/2011 ...

Substansi Penataan Ruang dalam Perda NTT No.1/2011 ...

Posisi Kawasan Hutan Dalam Tata Ruang

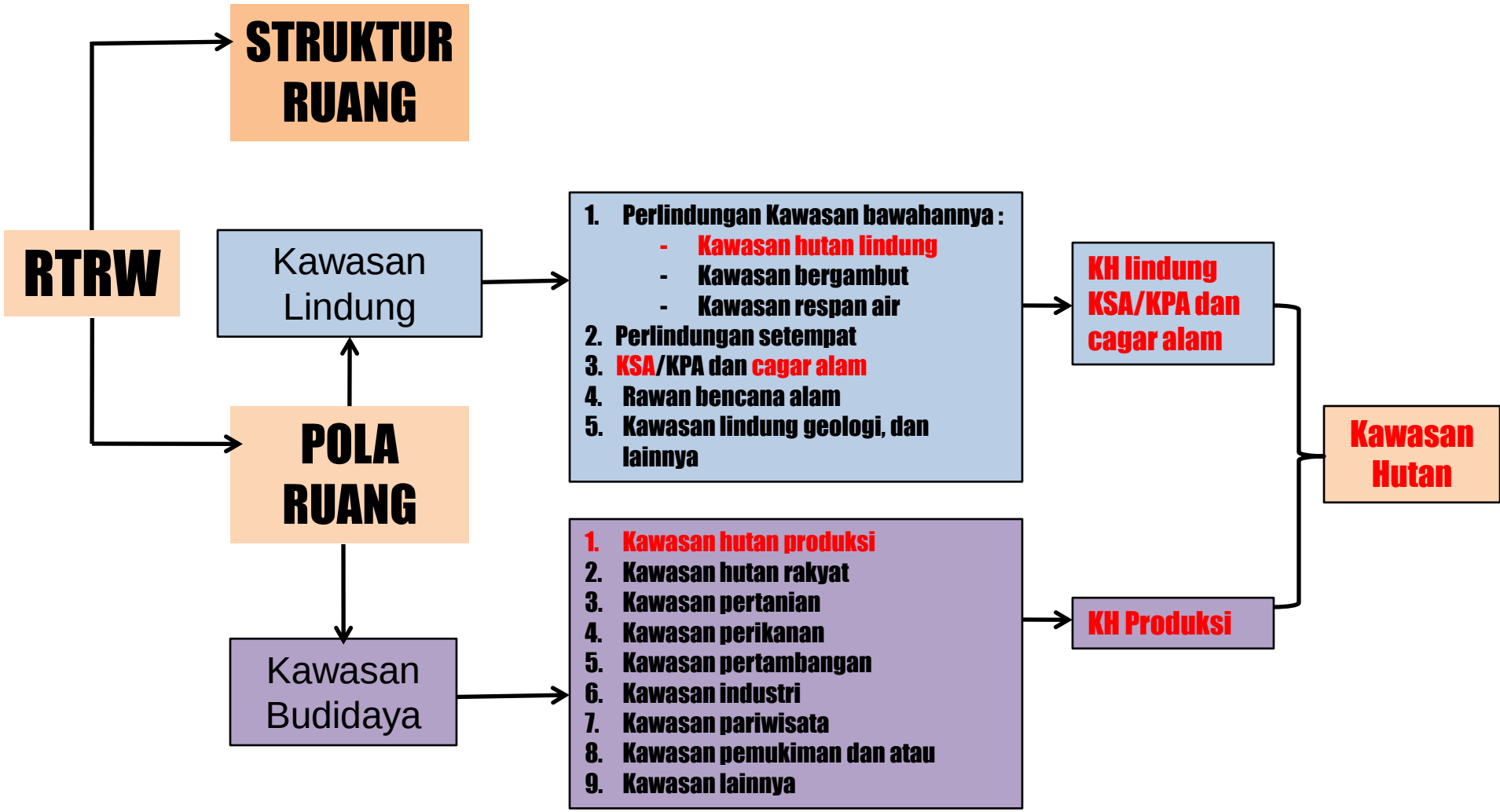

Gambaran Umum Kawasan Hutan NTT

Penataan Ruang Wilayah NTT

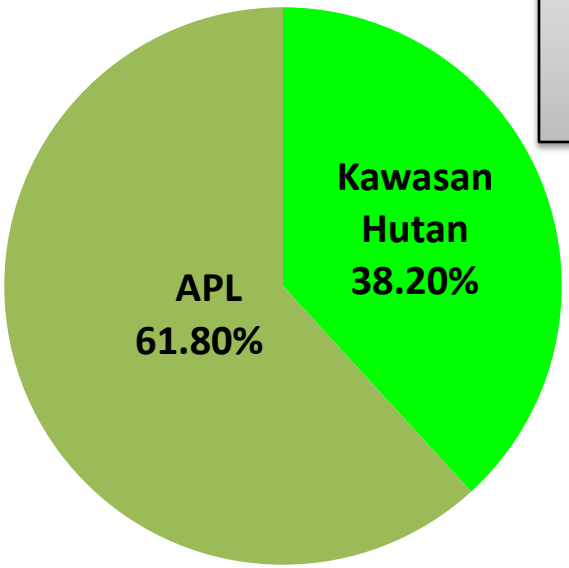

Fungsi	Luas (Ha)	%
Kawasan Hutan	**1.808.979,26**	**38,20**
APL	2.926.010,74	61,80
Total	**4.734.990,00**	**100.00**

APL : Areal Penggunaan Lain

Penataan Ruang Kawasan Hutan NTT berdasarkan fungsi

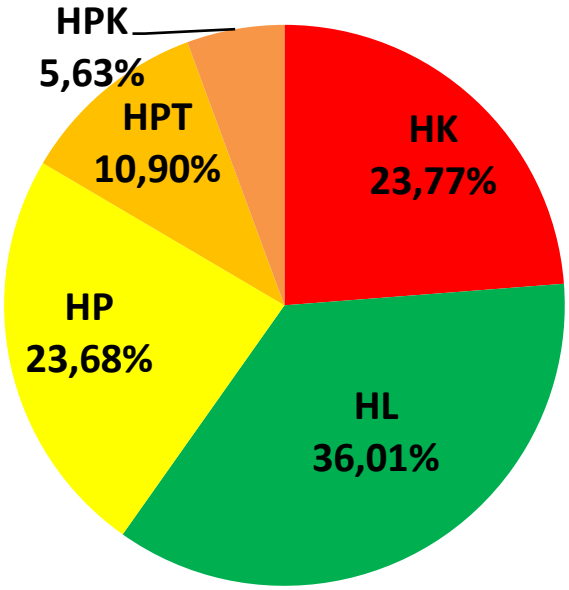

Fungsi Hutan	Luas (Ha)	(%)
Hutan konservasi	430.071,88	23,77
Hutan Lindung	651.472,64	36,01
Hutan Produksi Tetap	428.357,98	23,68
Hutan Produksi Terbatas	197.249,73	10,90
Hutan Produksi Konversi	101.827,03	5,63
Total	**1,808,979,26**	**100.00**

Sumber : Update Tata Batas 2012 (Dinas Kehutanan Prov. NTT)

SEJARAH KAWASAN HUTAN

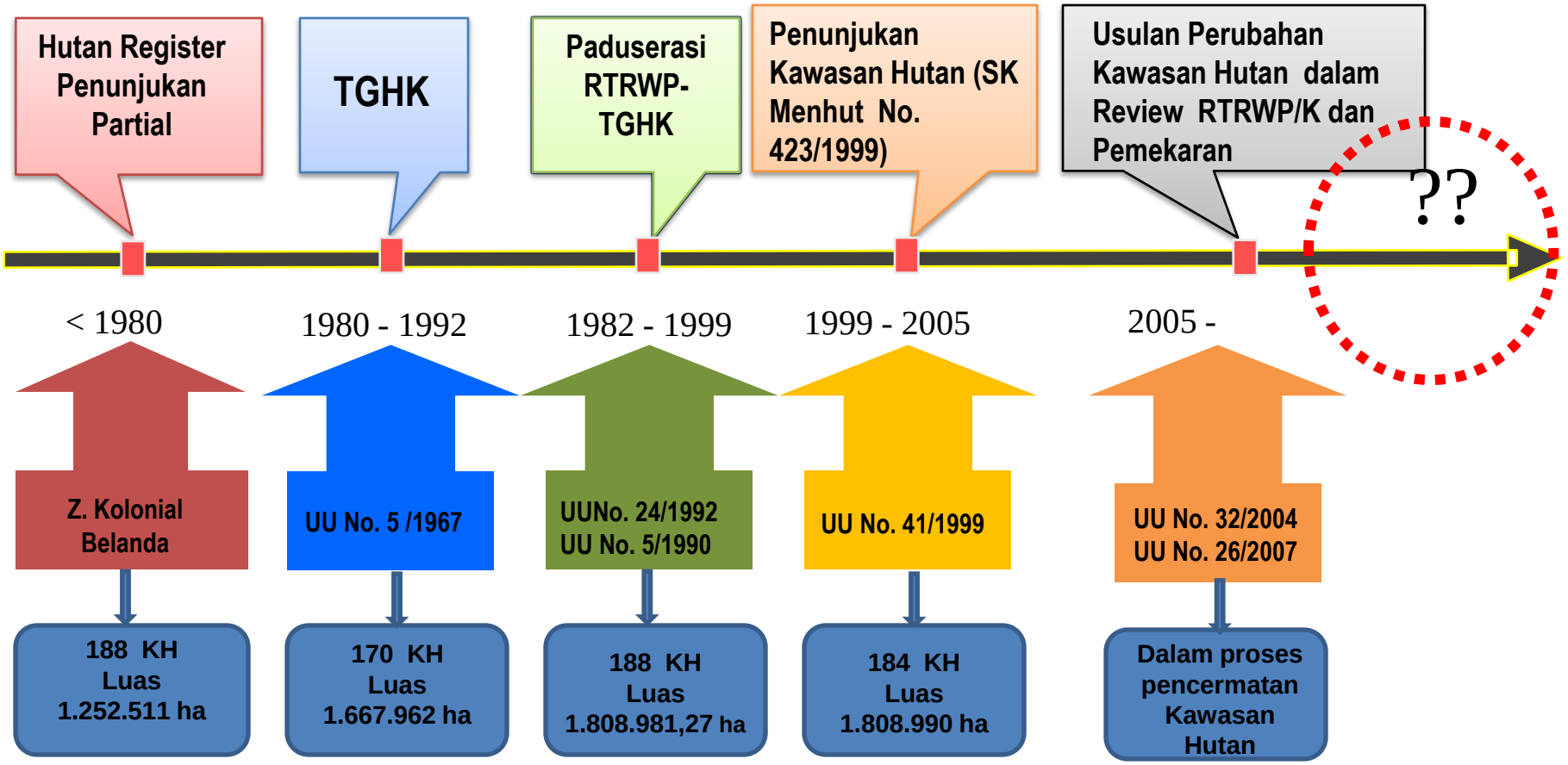

Kondisi dan Permasalahan Kawasan Hutan di Provinsi NTT

1. Adanya perubahan peruntukan kawasan hutan akibat :
   - Pengembangan/pemekaran wilayah kabupaten/kecamatan
   - Desa/pemukiman penduduk dan pembangunan sarana/fasilitas umum yang bersifat permanen (perkantoran/sekolah/rumah ibadah/puskesmas/jalan raya, dll)
2. Adanya perubahan luas kawasan hutan sesuai hasil tata batas (oleh BPKH wilayah XIV Kupang)
3. Adanya perubahan fungsi kawasan hutan
4. Adanya kelompok hutan alam yang secara de facto diakui masyarakat tetapi secara de jure belum ditetapkan sebagai kawasan hutan negara sesuai ketentuan yang berlaku

Dampak dari Permasalahan Kawasan Hutan di Provinsi NTT

PENGELOLAAN HUTAN OLEH PEMANGKU KAWASAN MENJADI TIDAK EFEKTIF DAN OPTIMAL :

- **Dilematis Sikap Pada Tingkat Lapangan Terhadap Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Lainnya**
- **Kawasan Hutan Menjadi Area Open Akses**
- **Masyarakat Terus Berspekulasi Memanfaat Ruang Hutan Secara Illegal**

Contoh Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kali Kupang di Kota Kupang

PETA
KH. KALI KUPANG (RTK.174)
KOTA KUPANG

TELUK KUPANG

Lokasi Pengembangan/Pemekaran Ibukota Kabupaten ±1.500 Ha

LEGENDA
Jalan Negara
Jalan Lainnya
Batas Kelurahan/Desa
Lapangan Terbang
Pemukiman
Sawah
Kawasan Hutan
Fungsi HP dapat dikonversi
Enclave

Kajian	Alasan
Yuridis	Belum pernah di tata batas
Teknis	Lahan datar dan dekat dengan kota
Fakta	Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

Contoh Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Nggorang Bowosie

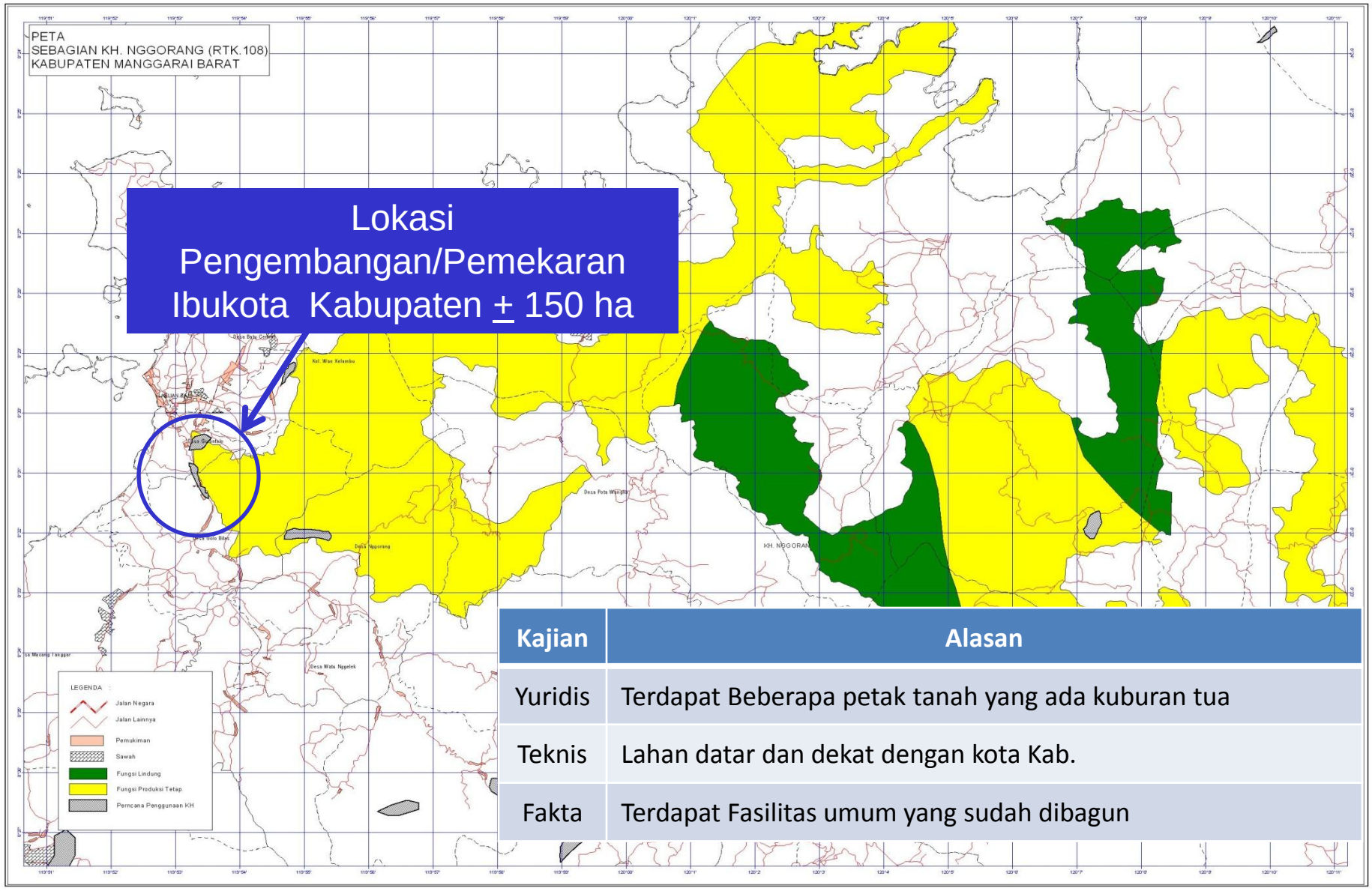

Kajian	Alasan
Yuridis	Terdapat Beberapa petak tanah yang ada kuburan tua
Teknis	Lahan datar dan dekat dengan kota Kab.
Fakta	Terdapat Fasilitas umum yang sudah dibagun

Contoh Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Waegara Wuji di Kabupaten Sumba Tengah

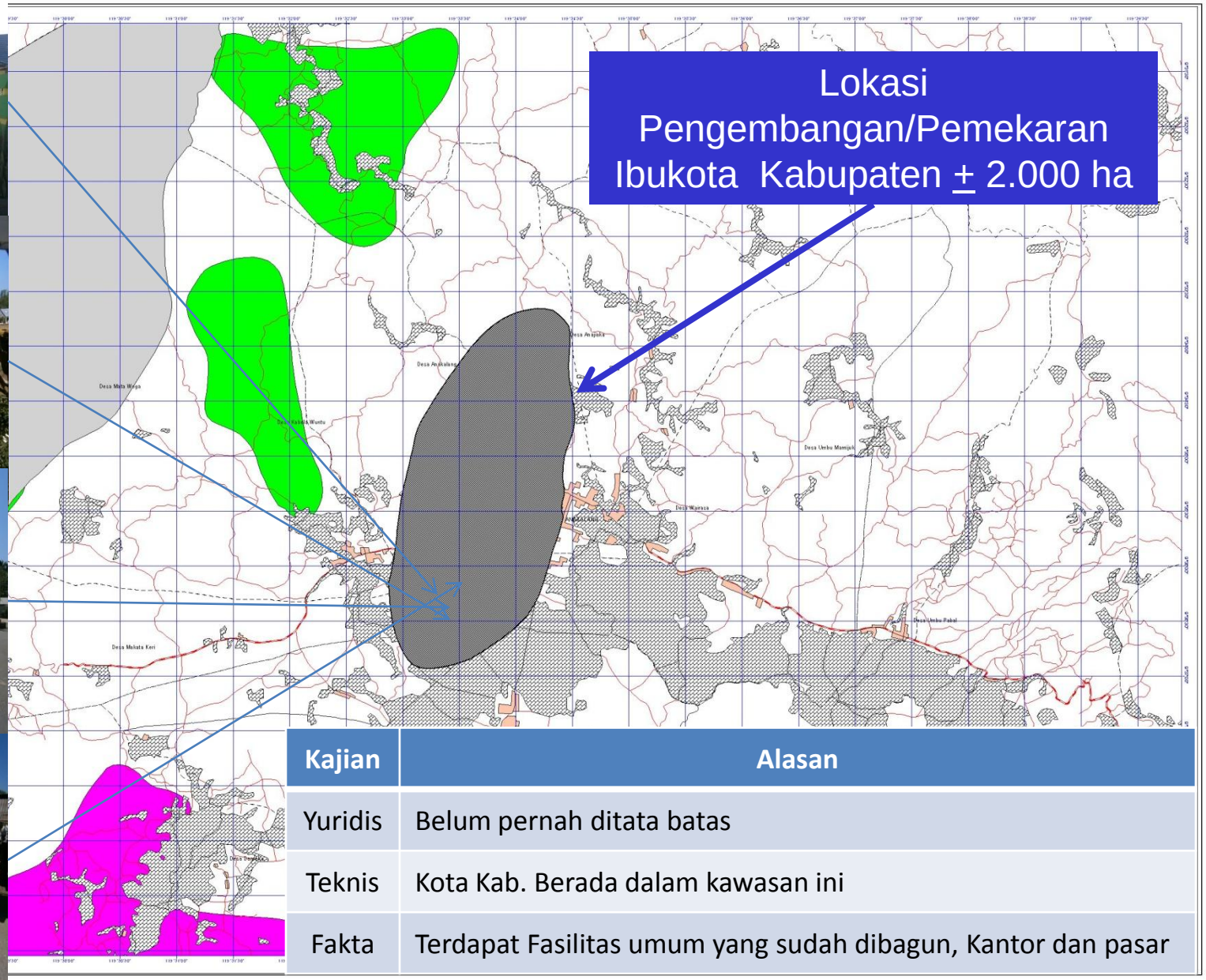

Kajian	Alasan
Yuridis	Belum pernah ditata batas
Teknis	Kota Kab. Berada dalam kawasan ini
Fakta	Terdapat Fasilitas umum yang sudah dibagun, Kantor dan pasar

Contoh Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Mutis Timau di Kabupaten TTS

Kajian	Alasan
Yuridis	Lahan pengganti telah disetujui
Teknis	Lahan datar dan dekat dengan kota Kab.
Fakta	Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

Contoh Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Laob Tumbesi di Kabupaten TTU

Lokasi Pengembangan
Ibukota Kabupaten ± 850 ha

Kajian	Alasan
Yuridis	Permohonan tukar menukar kawasan (Berproses)
Teknis	Lahan datar dan dekat dengan kota Kab.
Fakta	Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

Contoh Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lakaan Mandeu di Kabupaten Belu

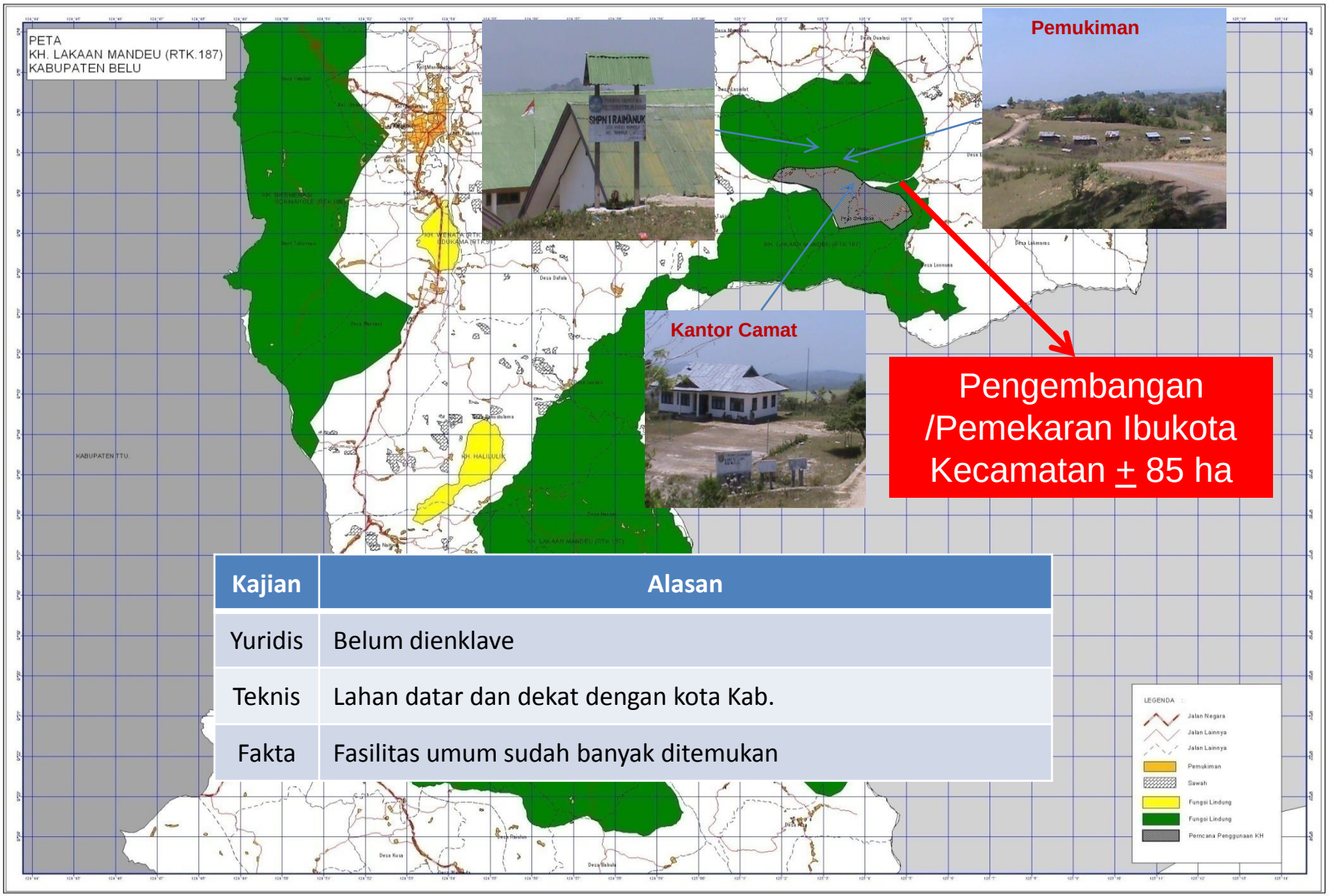

Kajian	Alasan
Yuridis	Belum dienklave
Teknis	Lahan datar dan dekat dengan kota Kab.
Fakta	Fasilitas umum sudah banyak ditemukan

Ruang Hukum Yang Memungkinkan Terkait Perubahan Kawasan Hutan melalui Revisi PERDA RTRWP

UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 23 :

(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, pasal 6 :

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:

a. secara parsial; atau

b. untuk wilayah provinsi.

Ruang Hukum Yang Memungkinkan Terkait Perubahan Kawasan Hutan melalui Revisi PERDA RTRWP

UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 23 :

(4) : RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal 31 :

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi KH serta penggunaan KH berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan

(2) Perubahan peruntukan dan fungsi KH serta penggunaan KH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRW

Dasar Pertimbangan Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi NTT

Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan

- Adanya perluasan pemukiman di dalam kawasan hutan
- Penggunaan lahan garapan, sarana dan prasarana umum bagi masyarakat menyebabkan fungsi hutan tidak dapat dipertahankan

Kepentingan kepastian hukum

Banyaknya permasalahan akibat tumpang tindih penggunaan lahan dengan kawasan hutan, memerlukan penyelesaian lebih lanjut dalam rangka kepastian hukum melalui review tata ruang sebagai landasan awal dalam penetapan batas kawasan hutan

Tujuan Perubahan Kawasan Hutan

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada :

- **Optimalisasi manfaat kawasan hutan,**
- **Kelestarian fungsi hutan,**
- **Efektifitas pengelolaan kawasan hutan,**
- **Keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional**

Daftar : Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT yang mengajukan Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Kabupaten/Kota	
Yang mengusul	Yang tidak mengusul
1. Kota Kupang	1. Rote Ndao
2. Kupang	2. Sabu Raijua
3. TTS	3. Sikka
4. TTU	4. Sumba Barat
5. Belu	5. Sumba Barat Daya
6. Alor	
7. Lembata	
8. Flores Timur	
9. Ende	
10. Ngada	
11. Nagekeo	
12. Manggarai	
13. Manggarai Barat	
14. Manggarai Timur	
15. Sumba Timur	
16. Sumba Tengah	

Data Usulan Perubahan Kawasan Hutan dari 21 Kab/Kota Se- NTT

No	Kabupaten/kota	Sebelum perubahan		Usulan Perubahan	Sesudah perubahan	
		Luas KH	%		Luas (Ha)	%
1	KOTA KUPANG	4.906,00	28.10	1.800,00	3.106,00	19,37
2	KUPANG	268.325,85	45,49	59.140,55	209.185,30	38,47
3	TIMOR TENGAH SELATAN	160.933,54	40,77	14.340,00	146.593,54	37,14
4	TIMOR TENGAH UTARA	123.536,00	46,27	3.200,00	120.336,00	45,08
5	BELU	58.155,55	23,78	4.503,73	53.651,82	21,94
6	ALOR	103.818,90	36.24	4.036,77	99.782,13	34,83
7	LEMBATA	48.627	38,40	4.475,63	44.151,37	34,86
8	FLORES TIMUR	60.807,63	33,54	17.489,87	43.317,76	23,89
9	ENDE	76.009,10	37.14	4.320,00	71.689,10	35,03
10	NGADA	91.714,22	55,72	25.801,48	65.912,74	40,66
11	NAGEKEO	40.105,00	28,30	9.699,00	30.406,00	21,46
12	MANGGARAI	30.206,72	14.41	770,00	29.436,72	17,45
13	MANGGARAI BARAT	74.848,93	25,39	2.790,00	72.058,93	24,45
14	MANGGARAI TIMUR	90.020,19	35,98	6.751,00	83.269,19	33,28
15	SUMBA TIMUR	253.104,52	36,16	14.500,57	238.603,95	34,08
16	SUMBA TENGAH	121.550,42	66,86	60.447,53	61.102,89	32,69
17	SUMBA BARAT	27.137,49	21,20	-	39.780,86	31,08
18	SUMBA BARAT DAYA	26.871,77	58,35	-	7.957,65	17,28
19	SIKKA	100.561,92	58,06	-	100.561,92	58,06
20	ROTE NDAO	39.780,86	53,95	-	27.137,49	36,80
21	SABU RAIJUA	7.957,65	5,51	-	26.871,77	18,59
Jumlah Total		**1.808.979,26**	**38.20**	**234.066,13**	**1.574.913,13**	**33,26**

Gambaran Kawasan Hutan Berdasarkan Usulan Perubahan

Sebelum Perubahan
Luas : 1.808.979,26 ha (38.20 %)

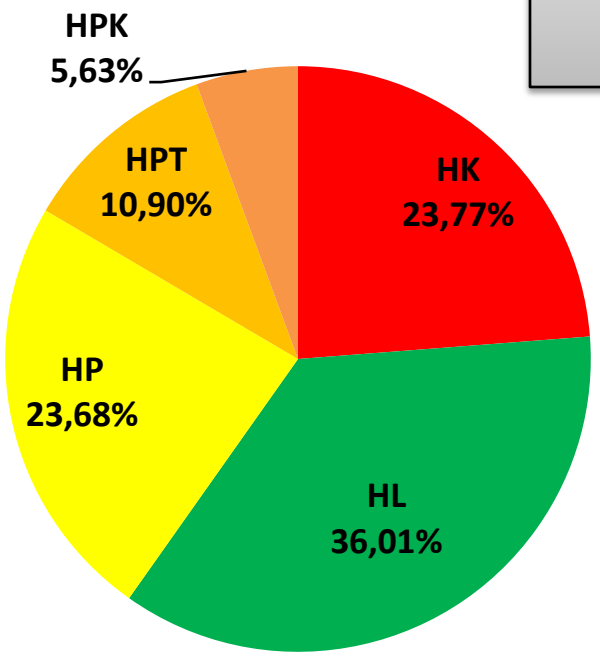

Setelah Perubahan
Luas : 1.574.913,13 ha (33,26%)

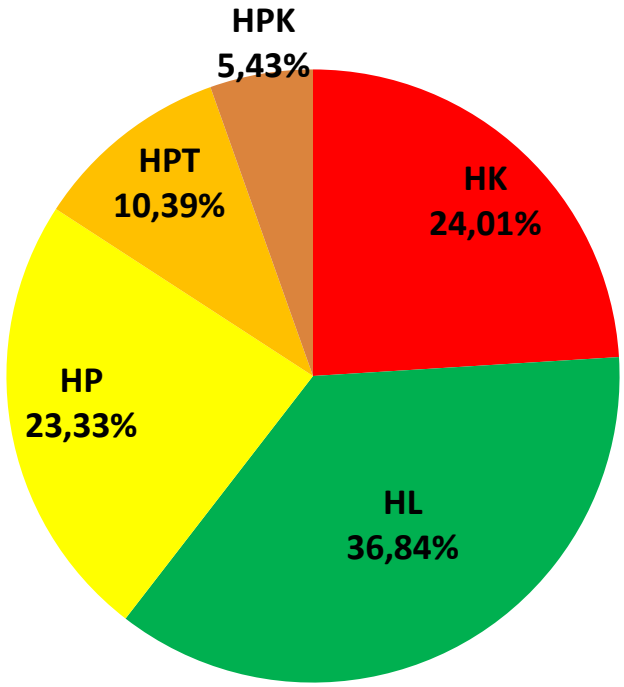

Fungsi Hutan	Sebelum		Sesudah	
	Luas (Ha)	NTT (%)	Luas (Ha)	NTT (%)
HK	430.071,88	23,77	378.102,78	24,01
HL	651.472,64	36,01	580.228,15	36,84
HP	428.357,98	23,68	367.366,92	23,33
HPT	197.249,73	10,90	163.688,25	10,39
HPK	101.827,03	5,63	85.527,03	5,43
Total	**1.808.979,26**	**100**	**1.574.913,13**	**100**

Rekomendasi Usulan Perubahan Berdasarkan Hasil Kajian

No	Kabupaten/Kota	Luas KH (ha)	Usulan Perubahan Kawasan Hutan (Ha)	Rekomendasi		
				Dilepas tanpa syarat	Dilepas beryarat	Dipertahankan sbg KH
1	KOTA KUPANG	4.906,00	1.800,00	1.800,00	-	-
2	KUPANG	268.325,85	59.140,55	59.140,55	-	-
3	TIMOR TENGAH SELATAN	160.933,54	14.340,00	14.340,00	-	-
4	TIMOR TENGAH UTARA	123.536,00	3.200,00	2.342,78	-	857,22
5	BELU	58.155,55	4.503,73	4.503,73	-	-
6	ALOR	103.818,90	4.036,77	-	2.895,77	1.141,00
7	LEMBATA	48.627,00	4.475,63	1.714,44	1.914,26	846,93
8	FLORES TIMUR	60.807,63	17.489,87	12.163,54	5.326,33	-
9	ENDE	76.009,10	4.320,00	4.320,00	-	-
10	NGADA	91.714,22	25.801,48	6.357,57	19.443,91	-
11	NAGEKEO	40.105,00	9.699,00	-	9.699,00	-
12	MANGGARAI	30.206,72	770,00	356,78	413,22	-
13	MANGGARAI BARAT	74.848,93	2.790,00	-	2.782,34	7,66
14	MANGGARAI TIMUR	90.020,19	6.751,00	5.137,73	1.613,27	-
15	SUMBA TIMUR	253.104,52	14.500,57	14.215,80	-	284,77
16	SUMBA TENGAH	121.550,42	60.447,53	19.326,16	38.534,09	2.587,28
17	ROTE NDAO	39.780,86	-	-	-	-
18	SABU RAIJUA	7.957,65	-	-	-	-
19	SIKKA	100.561,92	-	-	-	-
20	SUMBA BARAT	27.137,49	-	-	-	-
21	SUMBA BARAT DAYA	26.871,77	-	-	-	-
	TOTAL NTT	**1.808.979,26 (38,20%)**	**234.066,13**	**145.719,08**	**82.622,19**	**5.724,86**

Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Kajian

Usulan Perubahan Kawasan Hutan (Ha)	Hasil Kajian		
	Rekomendasi KH	Luas (ha)	Penjelasan
234.660,13	Dipertahankan sbg KH	**5.724,86**	Hasil analisis memenuhi 10 kriteria analisis deliniasi KH : 1.)analisis skoring ≥ 175%, 2.)kelerengan ≥ 40%, 3.) ketinggian ≥ 2.000 dpl, 4.) bergambut dihulu sungai hingga ketebalan 3 m, 5.) KH dgn jarak radius tertentu, 6.) buffer zone 7.) pelstarian plasma nutfah 8.)perlindungan satwa liar 9.)cagar budaya/ilmu pengetahuan 10.)rawan bencana
	Dilepas bersyarat	**82.622,19**	Memenuhi kriteria utk dipertahankan sebagai KH namun telah merupakan pemukiman shg pada prinsipnya dapat direkomendasikan menjadi APL selama bukti-bukti dokumen pendukung aspek kesejarahan, legalitas kampung/desa dan dokumen penunjang lainnya dapat dilengkapi serta memperhatikan aspek ketercukupan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas pulau
	Dilepas tanpa syarat	**145.719,08**	Hasil analisis memenuhi 10 kriteria prioritas yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi APL : 1.)Adanya pemukiman dan fasilitas sosial serta fasilitas umum, 2)Tdk rawan bencana 3.) Non daerah resapan 4.) Luas KH ≥ 30%, 5.) jenis tanah bukan renzina, litosol dan histosol, 6.)kelerengan < 40%, 7.)kesesuaian budidaya pertanian, 8.)tutupan lahan, 9.)tdk berhutan, 10.)tdk menyebabkan fragmentasi KH

Perubahan Kawasan Hutan berdasarkan Rekomendasi Usulan Perubahan

No	Kabupaten/kota	Sebelum perubahan		**Rekomendasi berubah (dilepas tanpa syarat dan dilepas bersyarat)**	Sesudah perubahan	
		Luas KH	%		Luas (Ha)	%
1	KOTA KUPANG	4.906,00	28.10	1.800,00	3.106,00	19,37
2	KUPANG	268.325,85	45,49	59.140,55	209.185,30	38,47
3	TIMOR TENGAH SELATAN	160.933,54	40,77	14.340,00	146.593,54	37,14
4	TIMOR TENGAH UTARA	123.536,00	46,27	2.342,78	121.193,22	45,40
5	BELU	58.155,55	23,78	4.503,73	53.651,82	21,94
6	ALOR	103.818,90	36.24	2.895,77	100.923,13	35,23
7	LEMBATA	48.627	38,40	3.628,70	44.998,30	35,53
8	FLORES TIMUR	60.807,63	33,54	17.489,87	43.317,76	23,89
9	ENDE	76.009,10	37.14	4.320,00	71.689,10	35,03
10	NGADA	91.714,22	55,72	25.801,48	65.912,74	40,66
11	NAGEKEO	40.105,00	28,30	9.699,00	30.406,00	21,46
12	MANGGARAI	30.206,72	14.41	770,00	29.436,72	17,45
13	MANGGARAI BARAT	74.848,93	25,39	2.782,34	72.066,59	24,45
14	MANGGARAI TIMUR	90.020,19	35,98	6.751,00	83.269,19	33,28
15	SUMBA TIMUR	253.104,52	36,16	14.215,80	238.888,72	34,12
16	SUMBA TENGAH	121.550,42	66,86	57.860,25	63.690,17	34,07
17	SUMBA BARAT	27.137,49	21,20	-	39.780,86	31,08
18	SUMBA BARAT DAYA	26.871,77	58,35	-	7.957,65	17,28
19	SIKKA	100.561,92	58,06	-	100.561,92	58,06
20	ROTE NDAO	39.780,86	53,95	-	27.137,49	36,80
21	SABU RAIJUA	7.957,65	5,51	-	26.871,77	18,59
Jumlah Total		**1.808.979,26**	**38.20**	**228.341,27**	**1.580.637,99**	**33,38**

Gambaran rekomendasi atas Usulan Perubahan

Sebelum Usulan Perubahan

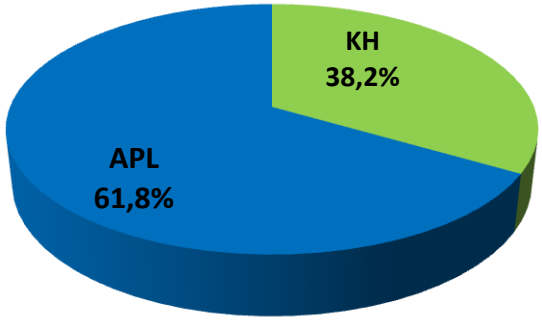

Fungsi	Luas (Ha)	%
Kawasan Hutan	**1.808.979,26**	**38,20**
APL	2.926.010,74	61,80
Total	**4.734.990,00**	**100.00**

Setelah Usulan Perubahan

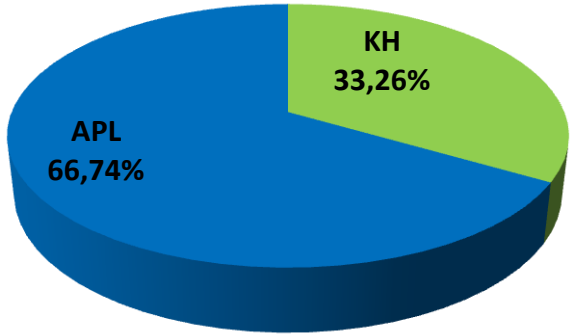

Fungsi	Luas (Ha)	%
Kawasan Hutan	**1.574.913,13**	**33,26**
APL	3.160.076,87	66,74
Total	**4.734.990,00**	**100.00**

Berdasarkan Rekomendasi Usulan

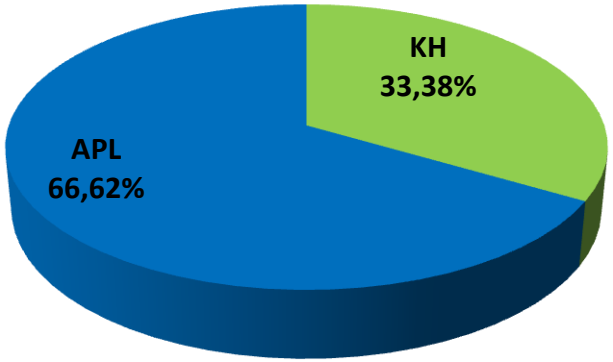

Fungsi	Luas (Ha)	%
Kawasan Hutan	**1.580.637,99**	**33,38**
APL	3.154.352,01	66,62
Total	**4.734.990,00**	**100.00**

HASIL PERUBAHAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGKAJIAN RTRW

No	Pulau	Sebelum perubahan			Sesudah perubahan	
		Luas KH (Ha)	Luas Kab. (Ha)	Porsi hutan thdp luas kab (%)	Luas KH (Ha)	Porsi hutan thdp luas kab (%)
1	Timor	615.856,94	1.466.029,00	42,01	533.729,88	36,41
2	Sumba	428.664,20	1.105.242	38,78	356.588,15	32,26
3	Flores	564.273,71	1.576.567	35,79	496.660,02	31,50
4	Lembata	48.627,00	126.638	38,40	44.998,30	35,53
5	Alor	103.818,90	286.460	36,24	100.923,13	35,23
6	Rote Ndao	39.780,86	128.000	31,08	39.780,86	31,08
7	Sabu Raijua	7.957,65	46.054	17,28	7.957,65	17,28
Total		1.808.979,26	4.734.990	38,20	1.580.637,99	33,38

PROSES YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN DALAM RANGKA EVALUASI RTRWP NUSA TENGGARA TIMUR

SUDAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN

1. Pengkajian usulan perubahan dari kabupaten (pendanaan Provinsi) pada rahun 2012
2. Pemantapan data pemetaan kawasan hutan dari kabupaten
3. Koordinasi dengan kabupaten dalam rangka penyediaan dana untuk proses penelitian dari Tim terpadu.
4. Koordinasi dalam bentuk Fasilitasi Rapat Teknis oleh :
   - Dinas Kehutanan Propinsi NTT
   - Bappeda Propinsi NTT
   - Dinas PU Propinsi NTT
   - Biro Ekonomi Setda Propinsi NTT

AKAN DILAKSANAKAN

- Persentasi Gubernur NTT di Kementerian Kehutanan tentang rencana usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (direncanakan bulan Juli 2013)
- **Penelitian Tim Terpadu terhadap rencana usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Prov. NTT (Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2010)**

Penutup

1. Perda RTRWP No. 1 Tahun 2011 telah ditetapkan, namun fakta lapangan menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan kawasan hutan sehingga dibutuhkan review RTRWP

2. Terhadap kawasan hutan eksisting yang sudah mengalami perubahan peruntukan dan fungsi, maka pada beberapa kabupaten telah dilakukan perubahan kawasan hutan secara parsial baik melalui proses pelepasan kawasan hutan maupun proses tukar menukar kawasan hutan. Sementara itu, provinsi juga memfasilitasi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara provinsi melalui proses review RTRWP yang akan diintegrasikan dalam RTRWP

TERIMA KASIH